

HEDONISME DAN SIKAP TERHADAP KORUPSI

Falasifatul Falah

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

falasifatul.falah@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah masalah kronis di Indonesia. Pelakunya tidak hanya terbatas dari kalangan pemerintah dan politisi melainkan juga anggota masyarakat lain termasuk mahasiswa. Korupsi diindikasikan sebagai akibat dari gaya hidup hedonis, yaitu berlebih-lebihan dan mementingkan materi duniawi. Sikap terhadap korupsi memegang peran yang kritis dalam persistensi perilaku korup. Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara hedonisme dengan sikap terhadap korupsi. Subjek penelitian adalah 107 orang mahasiswa. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Hedonisme yang terdiri dari 19 aitem yang memiliki daya beda antara 0,335 hingga 0,745 serta Skala Sikap Terhadap Korupsi yang terdiri dari 29 aitem dengan daya beda antara 0,302 sampai 0,832. Analisis data menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel tergantung (r_{xy}) sebesar 0,389 yang signifikan pada level 0,01 yang berarti ada hubungan positif yang signifikan antara hedonisme dengan sikap terhadap korupsi: makin tinggi tingkat hedonisme seseorang, maka makin positif pula sikapnya terhadap korupsi.

Individu yang terobsesi dengan gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan materi akan sulit menghadapi godaan-godaan duniawi, meskipun individu tersebut menyadari bahwa godaan-godaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran. Perintah untuk menjauhi hedonisme sebetulnya sudah banyak terkandung dalam ajaran agama dan kearifan lokal. Menolak hedonism dengan demikian menjadi salah satu cara untuk memerangi korupsi.

Kata kunci: hedonisme, sikap terhadap korupsi

Abstract

Corruption is a chronic problem in Indonesia. Its perpetrators are not only people who work in government and politicians but also the other parts of the society including students. It has been indicated that corruption is a result of hedonistic lifestyle. This study examines correlation between hedonism and attitudes toward corruption. The subjects of this research are 107 university students. Data are measured by Hedonism Scale and Attitudes towards Corruption Scale. The Hedonism Scale consists of 19 items, each has index of discrimination between 0,335 to 0,745; while the Attitudes towards Corruption Scale consists of 29 items with index of discrimination between 0,302 to 0,832. Data analysis shows coefficient of correlation between independent variable and dependent variable (r_{xy}) is 0,389 which is significant at 0,01 level, means there is a positive correlation between hedonism and attitudes towards corruption: the more hedonistic an individual, the more positive that individual's attitude towards corruption. Individuals that are obsessed with pleasurable life would find difficulties in resisting temptation, even though it is contrary to high principles such as honesty. Religious teachings and local wisdoms have actually asked to avoid hedonism. Therefore resisting hedonism may become one of the ways to fight corruption.

Keywords: hedonism, attitudes towards corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah kronis di Indonesia. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2013, Lembaga antikorupsi *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia sepanjang tahun 2013 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara dengan skor 32 (Transparency International, 2013). Berdasarkan data tersebut, posisi Indonesia berada di bawah beberapa negara ASEAN lain seperti Singapura, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, serta Filipina, bahkan juga lebih buruk dari beberapa negara yang dililit konflik seperti Ethiopia dan Kosovo (Dara, 2013). Para eksekutif senior dari investor asing yang ditugaskan di Indonesia bahkan mengakui bahwa korupsi menyebabkan "*persistent headache*" (pusing yang berkepanjangan) dalam melakukan bisnis di Indonesia (Crossin, Brown, & Norris, 2013).

Hal yang mengkhawatirkan adalah, meskipun kasus-kasus tindak pidana korupsi didominasi oleh para pejabat publik dan pegawai negeri sipil, tetapi setiap individu berpotensi untuk melakukan perbuatan korup, termasuk generasi muda dari kalangan terdidik yaitu mahasiswa. Baru-baru ini majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menyatakan bahwa seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di Kota Semarang "terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut". Mahasiswa tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi dana APBN karena "menilap dana hibah Rp 96,5 juta dari pencairan dana Rp 100 juta atas proposal yang diajukan" dan diganjar hukuman kurungan selama 1,5 tahun (Handriana, 2013).

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain" (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pranala permanen).

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyiratkan adanya perluasan dari bentuk korupsi, antara lain dengan menyebutkan tentang korupsi waktu yang berarti "penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi", sedangkan kata kerja "mengorupsi" disinonimkan dengan "menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya)" (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pranala permanen).

Definisi "korupsi" (*corruption*) menurut Kamus Oxford adalah "*dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery*" yang berarti ketidakjujuran atau kecurangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, khususnya yang melibatkan tindak penyuapan. Kamus ini juga menyebutkan bahwa korupsi juga bisa berarti "*the action or effect of making someone or something morally depraved*" yang artinya suatu tindakan atau akibat yang menyebabkan kerusakan moral pada seseorang atau sesuatu hal (Oxford Dictionaries, pranala permanen).

Kamus Oxford lebih lanjut mendefinisikan kata sifat "korup" (*corrupt*) sebagai "*having or showing a willingness to act dishonestly in return for money or personal gain*" yang artinya kesengajaan untuk bertindak tidak jujur dalam hal pengembalian

uang atau mengambil keuntungan pribadi, serta sebagai kerusakan moral (Oxford Dictionaries, pranala permanen).

Teori *the Broken Window* oleh Wilson dan Kelling digunakan oleh Lie untuk menjelaskan bahwa aktivitas korupsi erat kaitannya dengan perilaku korup pada masa sekolah atau kuliah. Perilaku berbohong, menyontek, dan mencuri yang dilakukan oleh anak-anak pada masa sekolah tumbuh sebagai embrio aktivitas korupsi pada masa dewasa. Lebih buruk lagi, perilaku menyontek yang didorong oleh guru atau sistem pendidikan, seperti dalam kasus Ujian Nasional, akan membentuk kecenderungan dan kebiasaan korupsi (Lie, 2011).

Sikap terhadap korupsi memegang peran yang kritis dalam persistensi perilaku korup (Cameron, Chaudhuri, Erkal, & Gangadharan, 2005). Heckausen (Rabl, 2011) meyakini bahwa keinginan atau hasrat untuk melakukan aktivitas korupsi menjadi makin kuat dengan adanya sikap yang positif atau persetujuan terhadap korupsi, baik dari pelaku itu sendiri atau dari orang-orang yang penting bagi pelaku.

Sikap didefinisikan sebagai evaluasi atau penilaian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan sosial (Baron & Byrne, 2004). Pengertian lain menyatakan sikap sebagai tendensi psikologis yang di dalamnya terkandung kesetujuan atau ketidaksetujuan dalam derajat tertentu, yang dinyatakan melalui penilaian terhadap suatu terhadap suatu objek (Albarracin, Johnson, & Zanna, 2005).

Cameron dkk mengasumsikan bahwa sikap terhadap korupsi terbentuk oleh sistem sosial, politik, hukum, dan ekonomi di negara di mana individu tinggal, serta pengalaman hidup sehari-hari yang berkaitan dengan korupsi (Cameron, Chaudhuri, Erkal, & Gangadharan, 2005).

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sering ditandai dengan peningkatan kepemilikan materi yang jumlahnya tidak wajar serta gaya hidup yang berlebihan bagi individu dengan posisi tertentu. Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Khadafi, meyakini bahwa hedonisme istri-istri pejabat merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memicu maraknya korupsi di kalangan pejabat pemerintah di Indonesia (Suara Pembaruan, 2013). Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menjadikan gejala berubahnya gaya hidup seseorang sebagai salah satu petunjuk adanya kecurangan atau korupsi (Amrizal, 2004). Wajar bila akhirnya korupsi diindikasikan sebagai akibat dari gaya hidup yang berlebih-lebihan dan mementingkan materi duniawi yang disebut hedonisme.

Hedonisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup" (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pranala permanen).

Kamus Oxford menyatakan bahwa hedonisme (*hedonism*) adalah "*the pursuit of pleasure*" atau pengejaran atas kesenangan; dengan filosofi dasar bahwa kesenangan,

yang merupakan pemuasan atas hasrat, adalah puncak tertinggi dari tujuan hidup manusia (Oxford Dictionaries, pranala permanen).

Orang yang memuja nilai hedonisme adalah orang yang dalam hidupnya memiliki tujuan menghadahi dirinya dengan kesenangan atau kenikmatan inderawi (Devos, Spini, & Schwartz, 2002; Spini, 2003).

Istilah hedonisme digunakan dalam berbagai konteks: hedonisme dalam filsafat berarti suatu pandangan bahwa hidup itu harus menyenangkan; hedonisme dalam psikologi didasarkan pada teori bahwa motivasi utama dari perilaku manusia adalah pengejaran kenikmatan. Veenhoven menyebut hedonisme sebagai suatu gaya hidup dimana kesenangan atau kenikmatan memegang peran penting (Veenhoven, 2003).

Teori hedonistik didasarkan pada prinsip bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencari kenikmatan serta menghindari penderitaan (Abdulkarim, 2012)).

Hedonisme secara umum dibagi menjadi tiga kategori pokok: pertama, hedonisme psikologis yang menyatakan bahwa salah satu elemen mendasar dari hidup manusia adalah untuk menemukan kesenangan dan meminimalisir penderitaan; kedua, hedonisme etis yaitu bagaimana cara manusia untuk memperoleh kesenangan dengan menghalalkan segala cara; serta ketiga, hedonisme rasional yaitu standar tertentu yang ditetapkan untuk mendapatkan kesenangan (Haba, 2011).

Luki Jani, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), berpendapat bahwa antara korupsi dan hedonisme “merupakan serangkaian yang saling berkesinambungan” (Timothy, 2011).

Latar belakang maupun teori-teori di atas mendasari dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk membuktikan adanya korelasi antara hedonisme dengan sikap terhadap korupsi.

TEMUAN EMPIRIS

Banyaknya literatur yang menyatakan bahwa baik faktor situasional maupun faktor individual memberikan kontribusi terhadap perilaku korupsi mendorong Rabi untuk mengungkapkan pengaruh dari faktor-faktor situasional yang sebelumnya jarang diteliti yaitu besarnya suap, tekanan waktu, dan derajat keabstrakan dari kode etik bisnis terhadap proses pengambilan keputusan subjektif oleh pelaku korupsi (Rabi, 2011).

Rabi dan Kuhlmann menguraikan proses korupsi sebagai berikut: Pertama, korupsi merupakan perilaku menyimpang yang mengejawantahkan diri sebagai penyalahgunaan atas suatu fungsi yang telah diamanatkan oleh insitusi atau oleh orang lain; Kedua, penyalahgunaan amanat tersebut terjadi karena adanya inisiatif dari seorang individu atau individu lainnya yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi pribadinya sendiri atau dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain yang tidak berhak; Ketiga, korupsi merupakan proses pertukaran keuntungan dan atau

pertukaran imbalan yang bersifat timbal balik di antara semua pihak yang ikut ambil bagian dalam suatu hubungan yang korup; Keempat, korupsi mengakibatkan kerugian dan kerusakan bagi masyarakat secara ekonomi maupun politis; Kelima, tindakan korup bersifat tersembunyi dan dirahasiakan oleh pihak-pihak yang membangun konspirasi atau kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat tersebut (Rabl, 2011).

Sebuah studi dilakukan di 35 negara dengan menggunakan *individual-level data* untuk meneliti faktor-faktor yang berperan menentukan sikap terhadap korupsi; hasilnya menunjukkan secara konsisten bahwa kaum perempuan, pekerja, orang yang kurang kaya, serta individu berusia lanjut (lansia) ternyata lebih besar penolakannya terhadap korupsi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengaruh sosial memainkan peranan penting dalam menentukan sikap individu terhadap korupsi (Gatti, Paternostro, & Rigolini, 2003).

Studi tentang hubungan antara gender dengan korupsi sebelumnya telah dilakukan oleh Swamy dkk yang menggunakan beberapa set data independen. Data mikro menunjukkan bahwa kaum perempuan lebih sedikit terlibat dalam aktivitas suap dan kurang memaafkan pihak yang menerima suap. Data lintas-negara menunjukkan bahwa korupsi berkurang intensitasnya bila semakin banyak posisi yang ditempati perempuan di kursi parlemen atau eselon-eselon teratas dalam birokrasi (Swamy, Knack, Lee, & Omar, 2001).

Perbedaan gender dalam korupsi juga dikuatkan oleh penelitian Torgler dan Valey yang hasilnya menunjukkan bahwa kaum perempuan menunjukkan perlawanan yang lebih besar terhadap korupsi dan penghindaran pajak (Torgler & Valey, 2010).

Berkaitan dengan kondisi demografis subjek, peneliti dari Harvard University menemukan bahwa persepsi orang-orang desa terhadap korupsi ternyata mengandung relatif sedikit informasi mengenai korupsi dalam kenyataan (Olken, 2005).

Efek sosial-ekonomi terhadap korupsi diteliti oleh Abdulkarim yang melakukan studi mengenai korupsi pada proses peradilan di Nigeria dan mengungkapkan bahwa konsistensi penegak hukum memainkan peran yang penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap korupsi (Abdulkarim, 2012)

Penelitian di India menunjukkan bahwa korupsi telah menyebar, melembaga, dan dipersepsi sebagai sesuatu yang wajar di India. Agama menjadi pusat dari kehidupan banyak orang di India, namun demikian banyak yang berargumentasi bahwa ajaran agama tertentu justru berperan dalam mendorong toleransi atau sikap positif terhadap korupsi, dan bahwa kontribusi dalam proses korupsi suatu lembaga agama merupakan upaya menyuap Tuhan (Pavarala & Malik, 2010).

Sebuah tim yang terdiri dari para peneliti dari University of Birmingham (UK), the Nigerian Institute for Social and Economic Research (Nigeria), University of Hyderabad (India), serta University of Ibadan (juga Nigeria) mencoba menggali hubungan antara keberagamaan seseorang dengan sikapnya terhadap korupsi. Para peneliti ini melakukan wawancara terhadap lebih dari 250 orang penganut Hindu, Sikh, Muslim,

dan Kristen, dengan status pekerjaan yang heterogen: birokrat, akademisi, eksekutif dan pegawai perusahaan, tokoh agama, serta mahasiswa perguruan tinggi; hasilnya menunjukkan bahwa korupsi juga dilakukan oleh individu yang merasa dirinya religius dan menyadari bahwa perbuatan itu berdosa. Para pelaku korupsi ini berdalih bahwa mereka tidak bisa menghindari tekanan situasi dan tuntutan lingkungan (Marquette, 2010).

Senada dengan penelitian yang dilakukan di negara-negara lain maupun penelitian yang bersifat global, studi tentang korupsi di Indonesia pun makin meningkat jumlahnya, tetapi masih didominasi oleh penelitian dalam bidang ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Penelitian yang spesifik mengenai psikologi korupsi di Indonesia masih terbatas jumlahnya.

Kuncoro yang meneliti persoalan korupsi dalam dunia bisnis di Indonesia menemukan bahwa faktor ketidakpastian situasi dan aturan memainkan peran yang signifikan, terutama menyangkut masalah pelicin atau suap (Kuncoro, 2006).

Amrizal menekankan adanya tiga faktor yang biasanya muncul dalam berbagai kasus kecurangan atau korupsi di Indonesia, terutama kasus penggelapan aset dan pencurian. Ketiga faktor tersebut adalah: Pertama, faktor tekanan yang dialami individu, misalnya tekanan untuk memperoleh uang; Kedua, faktor tersedianya kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan ditambah adanya kesempatan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut; serta Ketiga, adanya upaya untuk melakukan pembenaran atas kecurangan tersebut yang dipengaruhi oleh level integritas individu yang melakukannya (Amrizal, 2004).

Alatas dkk yang melakukan eksperimen mengenai korupsi terhadap 180 mahasiswa dan 147 Pegawai Negeri Sipil di Indonesia menemukan bahwa para Pegawai Negeri Sipil ternyata memiliki toleransi yang lebih besar terhadap korupsi dibandingkan mahasiswa. Para peneliti mengasumsikan bahwa perbedaan toleransi tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan pengalaman dalam menghadapi korupsi di dalam kehidupan nyata masing-masing (Alatas, Cameron, Chaudhuri, Erkal, & Gangadharan, 2008).

Penelitian yang dilakukan Falah pada 133 mahasiswa di dua kota di provinsi Jawa Tengah, Indonesia, menemukan bahwa mahasiswa yang menganggap dirinya antikorupsi pun ternyata memiliki kecenderungan untuk bertindak korup. Data deskriptif dari kuesioner dan wawancara mengungkapkan bahwa para subjek cenderung menunjukkan sikap negatif terhadap tindakan korup yang dilakukan oleh orang lain, namun ironisnya para mahasiswa tersebut menoleransi dirinya untuk berperilaku korup. Falah menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa: "Mahasiswa memang tidak melakukan tindakan korupsi terhadap uang negara, namun mereka melakukan pelanggaran terhadap hal yang diamanahkan pada mereka; sehingga bila diposisikan secara setara sesungguhnya mahasiswa juga berpotensi untuk melakukan korupsi yang sama dengan yang dilakukan oleh pejabat publik" (Falah, 2012).

Sebuah temuan yang menarik dihasilkan dari studi eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dari Harvard University dan University of Pennsylvania, keduanya di Amerika Serikat, bahwa mahasiswa yang dalam tugas-tugas sehari-harinya melakukan kecurangan, seperti menyontek, ternyata cenderung lebih tertarik untuk bekerja sebagai pegawai negeri atau pemerintah. Hasil ini memunculkan asumsi bahwa pekerjaan di sektor pemerintah dianggap memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan korupsi. Para peneliti dari kedua universitas tersebut juga menemukan bahwa ketidakjujuran akademis seperti yang dilakukan para mahasiswa di atas menjadi faktor prediktif bagi perilaku korup yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang sesungguhnya (Hanna & Wang, 2013).

METODE DAN HASIL PENELITIAN

Ada dua variabel dalam penelitian ini yaitu sikap terhadap korupsi sebagai variabel terikat dan hedonisme sebagai variabel bebas.

Definisi operasional dari kedua variabel di atas disarikan dari berbagai teori dan definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Sikap terhadap korupsi dalam penelitian ini adalah tendensi psikologis atau penilaian terhadap ketidakjujuran atau kecurangan, sedangkan hedonisme adalah gaya hidup yang didasarkan pada prinsip yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif semester 1 Fakultas Psikologi Unissula Semarang yang terdiri dari empat kelas: A, B, C, dan D. Seperempat dari populasi, yaitu anggota kelas C, menjadi subjek uji coba alat ukur; sementara sisanya yaitu mahasiswa dari kelas A, B, dan D menjadi subjek penelitian. Jumlah total subjek yang datanya memenuhi syarat untuk dianalisis adalah 34 orang untuk uji coba alat ukur dan 107 orang untuk uji hipotesis.

Data penelitian diambil dengan dua macam alat ukur yaitu Skala Sikap Terhadap Korupsi dan Skala Hedonisme.

Skala Sikap Terhadap Korupsi disusun berdasarkan tiga komponen sikap yang dipadukan dengan bentuk-bentuk perbuatan korup. Tiga komponen sikap disusun berdasarkan teori sikap yang konvensional, yaitu: komponen kognitif (keyakinan dan pengetahuan mengenai korupsi); komponen afektif (suasana hati, perasaan, dan emosi yang disebabkan oleh korupsi); serta komponen konatif (kecenderungan berperilaku korup atau perilaku korup yang pernah dilakukan di masa lalu) (Audebert, Deiss, & Rousset, 2006); sedangkan bentuk-bentuk perbuatan korup disusun oleh penulis berdasarkan berbagai referensi dan hasil observasi, yaitu: korupsi anggaran; korupsi waktu; korupsi peraturan lalu-lintas; suap; menitipkan calon murid/mahasiswa; korupsi uang orang tua; menitipkan calon karyawan; serta gratifikasi.

Skala Hedonisme disusun berdasarkan empat komponen, yaitu: penghargaan terhadap kenikmatan (*moral appreciation of enjoyment*); tujuan hidup (*life goals*); kepribadian yang mengejar sensasi (*sensation seeking personality*); serta aktivitas yang

menekankan pada kenikmatan yang dilakukan tanpa perasaan bersalah (*enjoying activities for pleasure and do so without guilt*) (Veenhoven, 2003).

Seleksi aitem pada kedua alat ukur dilakukan berdasarkan hasil analisis daya beda aitem pada uji coba alat ukur, dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dari Pearson untuk memperoleh korelasi aitem-total. Aitem-aitem yang memiliki korelasi aitem-total (r_{iy}) sama dengan atau lebih dari 0,3 dinyatakan terseleksi dan selanjutnya digunakan dalam alat ukur penelitian. Uji daya beda aitem pada Skala Sikap Terhadap Korupsi menghasilkan 29 aitem terseleksi dengan koefisien korelasi aitem-total berkisar antara 0,302 sampai 0,832 serta estimasi reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* sebesar 0,923. Uji daya beda aitem pada Skala Hedonisme menghasilkan 19 aitem terseleksi dengan koefisien korelasi aitem-total masing-masing antara 0,335 hingga 0,745 serta estimasi reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* sebesar 0,889.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik korelasi *product moment* dari Pearson. Analisis data menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel tergantung (r_{xy}) sebesar 0,389 yang signifikan pada level 0,01 yang mengandung makna ada hubungan positif antara hedonisme dengan sikap terhadap korupsi; artinya makin hedonis seorang individu, makin positif sikap individu tersebut terhadap korupsi. Sumbangan efektif dari variabel hedonisme terhadap variabel sikap terhadap korupsi adalah sebesar 15%.

DISKUSI

Hubungan antara hedonisme dengan sikap dijelaskan oleh Audubert dkk. Individu yang merasakan pengalaman kenikmatan akan mengembangkan sikap positif terhadap objek kenikmatan tersebut, dan sebaliknya pengalaman hedonisme yang rendah membuat sikap terhadap objek tersebut menjadi kurang positif (Audebert, Deiss, & Rousset, 2006).

Penggunaan teori hedonisme dalam menjelaskan perilaku korupsi dilakukan oleh Abdulkarim saat meneliti efek sosio-ekonomi dari korupsi dalam konteks hukum atau peradilan di Nigeria (Abdulkarim, 2012).

Teori hedonisme menjelaskan bahwa manusia dihadapkan pada dua pilihan yaitu penderitaan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Salah satu naluri manusia adalah menghindari dari ketidakseimbangan dan mencari kenikmatan, dan hal tersebut dimanifestasikan dalam setiap tindakannya. Individu, dengan demikian, selalu berusaha memperhitungkan setiap langkah hidupnya untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalisir setiap kerugiannya. Pelaku korupsi adalah individu yang memilih untuk lari dari penderitaan dan mengejar kesenangan. Kecurangan, termasuk korupsi, dilakukan karena perbuatan tersebut memberikan keuntungan duniawi yang lebih besar daripada kerugian bagi pelakunya (Abdulkarim, 2012).

Para penganut hedonisme di Indonesia memuja konsumerisme sebagai bentuk capaian sosial atau *prestise*, sehingga ada tuntutan agar melakukan upaya apapun untuk mendapatkan benda-benda konsumsi dan hal tersebut mendapatkan penghargaan sosial yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki banyak materi dianggap sebagai orang yang tidak beruntung. Sterotipi ini diyakini secara mendalam oleh masyarakat di Indonesia, di mana penghargaan pada seseorang seringkali diukur dari kepemilikan barang-barang mewah. Jalan untuk mendapatkan kemewahan itu sering kali menyeret pada cara-cara yang korup di mana pelaku melakukan pelanggaran hukum dan mencuri sesuatu yang bukan haknya. Haba meyakini bahwa hedonisme menjadi faktor pendorong yang kuat dalam mempercepat laju korupsi di Indonesia, meskipun fakta tersebut sama sekali tidak disadari atau tidak diakui oleh para pelaku korupsi (Haba, 2011).

Salah satu efek dari hedonisme adalah mengikis ikatan sosial; dalam konteks ini individu yang mementingkan mengejar kenikmatan bagi dirinya sendiri akan menjadi lebih tidak peka terhadap kebutuhan individu lain di sekitarnya, yang pada akhirnya akan mengarah pada penurunan moral (Veenhoven, 2003). Hal ini berimplikasi pada perilaku individu yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan korupsi, demi mendapatkan kesenangan yang diinginkannya. Individu yang terobsesi dengan gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan materi atau hedonisme akan sulit menghadapi godaan-godaan duniawi, meskipun individu tersebut tahu bahwa godaan-godaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang luhur seperti kejujuran dan amanah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah: ada hubungan positif yang signifikan antara hedonisme dengan sikap terhadap korupsi: makin tinggi tingkat hedonisme seseorang, maka makin positif pula sikapnya terhadap korupsi.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa sikap terhadap korupsi merupakan faktor penentu yang penting yang mendorong tindakan korupsi, dengan demikian upaya untuk memerangi korupsi harus pula diawali dengan mengurangi persetujuan terhadap tindakan korupsi itu sendiri.

Penelitian ini membuktikan bahwa hedonism memiliki kaitan yang erat dengan sikap terhadap korupsi, sehingga bila kita ingin meningkatkan sikap tegas terhadap korupsi salah satu jalan yang direkomendasikan adalah mengurangi hedonisme. Memperbaiki cara pandang masyarakat yang hedonis bahkan diyakini sebagai senjata yang lebih tepat dalam memberantas korupsi di Indonesia dibandingkan upaya hukum (Haba, 2011).

Upaya untuk mencegah hedonisme sebetulnya banyak terkandung dalam nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Bardi dan Schwartz menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa antara hedonisme dengan tradisi tidak sejalan karena

perilaku yang mengekspresikan komitmen terhadap tradisi biasanya mensyaratkan pengendalian diri yang bertentangan dengan hasrat hedonistik yang gemar mengejar kenikmatan duniawi (Bardi & Schwartz, 2003).

Agama juga melarang hedonisme. Studi empiris menegaskan bahwa hedonisme memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan religiusitas (Devos, Spini, & Schwartz, 2002). Salah satu ayat dalam kitab suci umat Islam, Al Quran, misalnya, mengingatkan agar orang tidak berperilaku hedonis dan mengendalikan hawa nafsu duniawinya.

"...Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya)..." (QS. 79:37-41)

(Terjemahan 114 Surah Al-Quran, 2008).

Berdasarkan uraian di atas penulis menawarkan rekomendasi untuk merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia serta ajaran agama yang mengajarkan untuk menjauhi hedonisme, sebagai salah satu upaya untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Peneliti juga menyarankan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti hubungan antara hedonisme dengan perilaku korupsi pada subjek-subjek lain di Indonesia, khususnya pada kelompok yang paling banyak terindikasi korupsi, seperti pegawai negeri sipil dan politisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Y. (2012). Socio-Economic Effects of Judicial Corruption in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 1 (1), 31-36.
- Alatas, V., Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2008). *Subject pool effects in a corruption experiment: A comparison of Indonesian public servants and*. Economic Science Association, . Springer.
- Albarracin, D., Johnson, B. T., & Zanna, M. P. (2005). *The Handbook of Attitudes*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Retrieved November 14, 2013, from bpkp.go.id: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteksi.pdf
- Audebert, O., Deiss, V., & Rousset, S. (2006). Hedonism as a predictor of attitudes of young French women towards meat. *Appetite*, 46, 239-247.
- Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and Behavior: Strength and Structure of Relations. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 29, 1207-1220.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial* (10 ed., Vol. 1). Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2005). *Do attitudes towards corruption differ across cultures - Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore*. Social Science Electronic Publishing, Inc.

- Crossin, C., Brown, M., & Norris, S. (2013). *Anti-Corruption in Indonesia*. London: Control Risks.
- Dara, T. T. (2013, Desember 5). *Politik: Indeks Korupsi Indonesia Lebih Buruk Ketimbang Ethiopia dan Kosovo*. Retrieved December 4, 2013, from Metrotvnews.com: <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/1/198690/Indeks-Korupsi-Indonesia-lebih-Buruk-ketimbang-Ethiopia-dan-Kosovo>
- Devos, T., Spini, D., & Schwartz, S. H. (2002). Conflicts among Human Values and Trust in Institutions. *British Journal of Social Psychology*, 41, 481-494.
- Falah, F. (2012). Perilaku Korup di Mata Mahasiswa. *Seminar Nasional Psikologi Islami, Aplikasi Psikologi Islami dalam Pendidikan Karakter* (pp. 151-158). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN 978-602-96633-1-0.
- Gatti, R., Paternostro, S., & Rigolini, J. (2003). *Individual Attitudes Toward Corruption: Do Social Effects Matter?* World Bank Policy Research.
- Haba, J. (2011, February 10). *Opinion: Hedonism accelerates corruption*. Retrieved December 7, 2013, from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/10/hedonism-accelerates-corruption.html>
- Handriana, E. (2013, November 19). *Korupsi Dana Hibah, Mahasiswa Dihukum 1,5 Tahun*. Retrieved November 19, 2013, from SuaraMerdeka.com: <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/19/180208/Korupsi-Dana-Hibah-Mahasiswa-Dihukum-15-Tahun>
- Hanna, R., & Wang, S.-Y. (2013). *Dishonesty and Selection Into Public Service*. Harvard University, Kennedy School of Government. Cambridge: The National Bureau of Economic Research.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (pranala permanen). *Kata Dasar: Hedonisme*. Retrieved November 12, 2013, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan): <http://kbbi.web.id/hedonisme>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (pranala permanen). *Kata Dasar: Korupsi*. Retrieved November 12, 2013, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (dalam jaringan): <http://kbbi.web.id/korupsi>
- Kuncoro, A. (2006). Corruption and Business Uncertainty in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 231, 11-30.
- Lie, A. (2011, January 25). *Opini: Anti-corruption curriculum is not the solution*. Retrieved December 7, 2013, from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2011/01/25/anticorruption-curriculum-not-solution.html>
- Marquette, H. (2010). *Religion and Attitudes Towards Corruption in a Globalised World*. University of Birmingham.
- Olken, B. A. (2005). *Corruption Perception vs Corruption Reality*. Harvard University and NBER.
- Oxford Dictionaries. (pranala permanen). *Definition of Corrupt in English*. Retrieved November 12, 2013, from Oxford Dictionaries: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/corrupt?q=corrupt>

- Oxford Dictionaries. (pranala permanen). *Oxford Dictionaries*. Retrieved November 12, 2013, from Definition of Corruption in English: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/corruption>
- Pavarala, V., & Malik, K. K. (2010). *Religion, Ethics, and Attitudes towards corruption: A Study of Perspective in India*. Working Paper 53 - 2010, University of Birmingham, International Development Department.
- Rabl, T. (2011). The Impact of Situational Influences on Corruption in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 100, 85-101.
- Spini, D. (2003). Measurement equivalence of 10 value types from the Schwartz Value Survey across 21 countries. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 34 (1), 3-23.
- Suara Pembaruan. (2013, Oktober 24). *Fitra: Hedonisme Istri Pejabat Picu Maraknya Korupsi di Pemprov DKI*. Retrieved November 30, 2013, from BeritaSatu.com: <http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/146296-fitra-hedonisme-istri-pejabat-picu-maraknya-korupsi-di-pemprov-dki.html>
- Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & O. A. (2001). Gender and corruption. *Journal of Development Economics*, 64 (1), 25-55.
- Terjemahan 114 Surah Al-Quran. (2008, October 27). *079 Terjemahan An Nazi'at*. Retrieved December 7, 2013, from Terjemahan 114 Surah Al-Quran: <http://terjemahan114surahal-quran.blogspot.com/2008/10/079-terjemahan-naziat.html>
- Timothy, N. (2011, November 29). *Aksi Mantan Bupati Garut Contoh Nyata Korupsi dan Hedonisme*. Retrieved November 30, 2013, from TribunNews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/11/29/aksi-mantan-bupati-garut-contoh-nyata-korupsi-dan-hedonisme>
- Torgler, B., & Valey, N. T. (2010). Gender and Public Attitudes towards Corruption. *Contemporary Economic Policy* (4), 554-568.
- Transparency International. (2013, December 3). *Corruption Perceptions Index 2013: Asia Pacific*. Retrieved December 4, 2013, from Transparency International: http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/CPI2013_AsiaPacific_EN.jpg
- Veenhoven, R. (2003). Hedonism and Happiness. *Journal of Happiness Studies*, 4 (Art of living), 37-457.